



**PENGARUH KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERIODE 2004-2013**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH:

**ZULFIKRI NASUTION**  
**NIM:12 230 0128**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PENGARUH KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINANDI PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERIODE 2004-2013**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**ZULFIKRI NASUTION**  
**NIM:12 230 0128**

**Pembimbing I**

**Dr. Darwis Harahap, S. Hi., M. Si**  
**NIP. 19980818 200901 1 015**

**Pembimbing II**

**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 19860311 201503 1 005**

**JURUSANEKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Zulfikri Nasution**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, November 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Zulfikri Nasution** yang berjudul "**Pengaruh Konsumsi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2004-2013**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si**  
NIP.19780818 200901 1 015

**PEMBIMBING II**

**Azwar Hamid, MA**  
NIP. 19860311 201503 1 005

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Zulfikri Nasution**  
NIM : 12 230 0128  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi: **Pengaruh Konsumsi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2004-2013**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 September 2017

Pembuat Pernyataan,



*Zulfikri Nasution*  
**ZULFIKRI NASUTION**  
**NIM. 12 230 0128**

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : ZULFIKRI NASUTION  
NIM : 12 230 0128  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti** (*Non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGARUH KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2004-2013**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Di buat di: Padangsidimpuan  
Pada Tanggal, 12 September 2017  
Yang Menyatakan



**ZULFIKRI NASUTION**  
NIM: 12 230 0128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1336/In.14/G/G.6/PP.01.1/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa

Nama : Zulfikri Nasution  
NIM : 12 230 0128  
Jurusan/Konsentrasi : Ekonomi Syariah / Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Ujian Munaqasyah 73,75 (.....B.....) ditambah nilai Ujian Komprehensif 74..... (.....B.....), sehingga menjadi Nilai Skripsi 73,187 (.....B.....).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUMLAUDE : 3,50 – 4,00
- b. AMAT BAIK : 3,00 – 3,49
- c. BAIK : 2,50 – 2,99
- d. CUKUP : 2,00 – 2,49
- e. TIDAK LULUS : 0,00 – 1,99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,19. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Ekonomi Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 270

Padangsidimpuan, 17 Oktober 2017  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

Anggota Penguji :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
3. Muhammad Isa, S.T., M.M
4. Nofinawati, M.A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **ZULFIKRI NASUTION**  
NIM : 12 230 0128  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Konsumsi Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2004-2013

Ketua

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

**Dr. Darwis Harahap, S. H.I., M. Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

Anggota

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Dr. Darwis Harahap, S. H.I., M. Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

**Muhammad Isa, ST. MM**  
NIP. 19800605 201101 1 003

**Nofinawati, MA**  
NIP. 19821116 201101 2 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/ Tanggal** : Selasa, 17 Oktober 2017  
**Pukul** : 09:00 Wib s/d selesai  
**Hasil/Nilai** : 73,87 (B)  
**IPK** : 3,19  
**Predikat** : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA  
UTARA PERIODE 2004-2013**

**NAMA : ZULFIKRI NASUTION**  
**NIM : 12 230 0128**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat

Dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 10 November 2017  
Dekan,



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

## ABSTRAK

**Nama** :Zulfikri Nasution  
**Nim** :12 230 0128  
**Judul Skripsi** :**Pengaruh Konsumsi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2013**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori bahwa hubungan konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang positif, tetapi berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menyatakan bahwa hubungan antara ke dua variabel antara konsumsi pemerintah dengan kemiskinan tidak berpengaruh positif.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara periode 2004-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konsumsi pemerintah, teori kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya, data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Data yang diteliti adalah gabungan data *time series* dengan data *cross section* yaitu data panel yang di himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa konsumsi pemerintah tidak selalu berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara periode 2004-2013. Berdasarkan Uji t-test di dapatkan hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7.951296 > 3,24$ ) maka  $H_0$  ditolak artinya konsumsi pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan dan di peroleh pengaruh sebesar 30% sedangkan sisanya 70% di pengaruhi oleh varibel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada, ini disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan dengan tingkat pendidikan yang rendah dsb. Dan berdasarkan data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dengan adanya konsumsi yang di alokasikan oleh pemerintah tidak terlalu berpengaruh terhadap pengentasan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci** : **Konsumsi Pemerintah (X) Tingkat Kemiskinan (Y).**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan karunia dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “pengeruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2004-2013” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat, maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.A Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pembangunan Lembaga. Bapak Aswadi Lubis, SE, M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, selanjutnya Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis saat mengikuti perkuliahan dan menyusun skripsi ini.

3. Muhammad Isa, ST., MM Ketua Jurusan Ekonomi Syariah beserta Ibu Delima Sari Lubis, S.EI., MA Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu penulis saat mengikuti perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si Pembimbing I beserta Bapak Azwar Hamid, M.A Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus memberikan motivasi, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini agar cepat selesai.
6. Bapak Johan Alamsyah sebagai Penasehat Akademik yang sudah banyak membantu penulis dalam mencapai gelar sarjana di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan serta pegawai perpustakaan yang telah memberi kesempatan dan membantu penulis mengumpulkan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Anwar Nasution, Ibunda Saidam Nasution, Abanganda Salwis Edi Nasution, Serta Saudara yang Lainnya yang selalu memotivasi studi penulis sampai akhir dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan surga-Nya dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Para sahabat Nur Saadah, Siti Maesaroh, Amra wijaya, Mudia Putra, Lusi Lestari, Yeni Anggraini, Siti Muningar, Gunawan Hasibuan, Nirwan Efendi Lubis, Hamdi Afiah

Nasution, Riskha Armaini Lubis dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012 khususnya di Jurusan Ekonomi Syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

11. Kantor BPS Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi penelitian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan ridha-Nya.

Padangsidempuan, 12 September 2017

Peneliti,

ZULFIKRI NASUTION

NIM. 12 230 0128

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fatḥah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fatḥah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Dommah dan wau	u	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman judul/sampul	
Halaman pengesahan pembimbing	
Surat pernyataan pembimbing	
Surat pernyataan keaslian skripsi	
Berita acara ujian munaqasyah	
Halaman pengesahan dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam	
Halaman pernyataan persetujuan publikasi	
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SKEMA.</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional Variabel.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II Landasan Teori.</b> .....	<b>14</b>
A. Kerangka Teori.....	14
1. Konsumsi .....	14
a. Pengertian konsumsi.....	14
b. Konsumsi Pemerintah.....	16
c. Ciri-ciri Barang Konsumsi.....	22
d. Tujuan Konsumsi .....	23
e. Pola Konsumsi.....	24
f. Konsumsi Dalam Pandangan Islam.....	25
g. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .....	28
h. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah .....	29
i. Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan.....	29
j. Faktor yang Dominan Mempengaruhi Konsumsi.....	31
1) Pendapatan ( <i>Income</i> ).....	31
2) Harga ( <i>Price</i> ).....	31

2. Kemiskinan .....	32
a. Pengertian Kemiskinan .....	32
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan .....	35
1) Pendidikan.....	35
2) Pengangguran.....	35
3) Pengeluaran pemerintah.....	36
c. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam .....	40
d. Paradigma Penanggulangan Kemiskinan .....	40
B. Penelitian Terdahulu. ....	45
C. Kerangka Fikir .....	48
D. Hipotesis.....	50
<b>BAB III Metodologi Penelitian. ....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian. ....	51
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Instrument dan Tehnik Pengumpulan Data .....	51
D. Teknik Analisis Data.....	52
1. Uji Estimasi.....	53
a. Uji <i>Commont Effect</i> .....	53
b. Uji <i>Fixed Effect</i> .....	54
c. Uji <i>Random Effect</i> .....	54
2. Uji Hipotasis .....	54
a. Uji t-test.....	54
b. Uji f-test .....	55
c. Uji Koefisien Determinasi .....	55
<b>BAB IV Hasil Penelitian. ....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	57
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara. ....	57
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara. ....	61
a. Visi .....	61
b. Misi .....	61
B. Hasil Uji Estimasi Data Panel. ....	62
1. Model Uji <i>Commont Effect</i> .....	62
2. Model Uji <i>fixed Effect</i> .....	63
3. Model <i>Random Effect</i> .....	64
C. Hasil Uji Hipotesis .....	65
1. Model Uji t-test .....	65
2. Model Uji f-test.....	66
3. Model Uji Koefisien determinasi .....	68

<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan. ....	70
B. Saran-Saran. ....	70
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.....	7
Tabel 1.2 Konsumsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	8
Tabel 1.3 Definisi Operasional Variabel .....	13
Tabel 2.1 Konsumsi, Pendapatan dan Tabungan .....	28
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 4.1 Kabupaten kota dan Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	59
Tabel 4.2 Model Regresi <i>Commont Effect</i> .....	62
Tabel 4.3 Hasil Estimasi <i>Fixet Effect</i> .....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Random Effect</i> .....	63
Tabel 4.5 hasil Uji t-test.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji f-test.....	66
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi .....	67

## DAFTAR SKEMA

	<b>Halaman</b>
Skema 2.1.....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Keppres No. 86 tahun 1998), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan beberapa ketentuan perundangan:

1. UU No.16 tentang statistik tahun 1997
  - a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan disegenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
  - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya perencanaan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.
  - c. Bahwa Undang-undang No.6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang-undang No.7 Tahun 1960 tentang statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntunan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bagian a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang statistik yang baru.<sup>1</sup>

2. Peraturan Presiden No 86 tahun 2007.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU No 7 Tahun 1960 tentang Statistik.<sup>2</sup>

Masa pemerintahan Hindia Belanda pada bulan Februari 1920 di kantor Statistik untuk pertama kalinya didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan dan berkedudukan di Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada bulan Maret 1923 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi untuk Statistik yang anggotanya merupakan wakil dari tiap-tiap departemen. Komisi tersebut diberi tugas untuk merencanakan tindakan-tindakan yang mengarah sejauh mungkin untuk mencapai kesatuan dalam kegiatan di bidang statistik di Indonesia. Selain dari itu, Komisi ini mengurus terutama bagian statistik yang dimuat di dalam Laporan Indonesia yang sebelumnya disebut Laporan Kolonial. Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Kantor Pusat Statistik dan dipindahkan ke Jakarta. Bersamaan dengan itu beralih pula pekerjaan mekanisme Statistik Perdagangan yang sekarang disebut Kantor Bea Cukai.

---

<sup>1</sup>[http: Statistik.com](http://Statistik.com), Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2017 Pukul. 15.11 WIB.

<sup>2</sup>[www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id), Diakses pada hari Kamis, 9 Maret 2017 Pukul. 09.15 WIB.

Kantor Pusat Statistik selain mencakup bidang administrasi mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum, Statistik Perdagangan, Statistik Pertanian, Statistik Kerajinan, Statistik Konjungtor, Statistik Sosial. Kegiatan statistik pada era ini diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Komisi ini juga pernah melakukan suatu kegiatan statistik yang bersifat monumental yaitu Sensus Penduduk 1930, yang merupakan sensus penduduk yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

Masa Pemerintahan Jepang Pada Juni 1942 Pemerintah Jepang baru mengaktifkan kembali kegiatan statistik yang utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer. Dan tugas serta fungsi kegiatan statistik pada saat itu lebih terkonsentrasi untuk keperluan militer.

Masa Pemerintahan RI Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan statistik ditangani oleh lembaga baru yaitu Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Perkembangan berikutnya KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kemakmuran. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>[http: Sejarah BPS. Com](http://Sejarah.BPS.Com), Diakses pada hari Kamis, 8 Desember 2016 Pukul. 23.17 WIB.

Masa Orde Baru sampai sekarang seiring dengan perkembangan zaman, khususnya pada pemerintahan Orde Baru, untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, mutlak dibutuhkan data statistik. Untuk mendapatkan data secara tepat dan akurat, salah satu unsurnya adalah pembenahan organisasi BPS. Dalam masa Orde Baru ini, BPS telah mengalami empat kali perubahan struktur organisasi:

PP 51 tahun 1998 tentang penyelenggaraan statistik. Tahun 1968, ditetapkan peraturan pemerintah No.16 tahun 1968 yaitu yang mengatur organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah. Tahun 1980, peraturan pemerintah No. 6 tahun 1980 tentang organisasi sebagai pengganti peraturan pemerintah No.16 tahun 1968. berdasarkan peraturan pemerintah No. 6 tahun 1980 di tiap Provinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Provinsi dan di Kabupaten atau Kotamadya terdapat cabang perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Pada tanggal 19 Mei 1997 menetapkan tentang statistik sebagai pengganti UU No.6 dan 7 tentang sensus dan statistik. Pada tanggal 17 Juli 1998 dengan keputusan Presiden RI No. 89 tahun 1998, ditetapkan BPS sekaligus mengatur tata kerja dan struktur organisasi BPS yang baru. Badan Pusat Statistik (BPS) banyak menerbitkan data baik bulanan maupun tahunan. Statistik Indonesia mencakup data ekonomi Indonesia seperti indeks harga konsumen, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional. Data sektoral juga ada seperti produksi, konsumsi, ekspor, dan impor komoditi penting. Data sosial seperti data

kependudukan, pendidikan, dan juga ketenagakerjaan. BPS juga menerbitkan indikator ekonomi yang bersifat bulanan.<sup>4</sup>

Konsumsi atau yang disebut “*Consumption*” adalah salah satu variabel makro ekonomi yang merupakan Peningkatan pendapatan *disposibel* akan meningkatkan daya beli riil sehingga akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi dan begitu sebaliknya. Sedangkan peningkatan konsumsi periode sebelumnya akan meningkatkan konsumsi pada saat sekarang. Disamping kenaikan tingkat bunga riil membuat konsumen sebagai penabung bukan peminjam mengurangi konsumsinya pada periode pertama untuk mendapatkan konsumsi yang lebih tinggi pada periode kedua. Artinya, kenaikan tingkat bunga riil membuat masyarakat mengurangi konsumsinya untuk mendapatkan keuntungan berupa kenaikan tingkat bunga sehingga mengurangi konsumsinya pada masa sekarang untuk mendapatkan konsumsi yang lebih besar dimasa yang akan datang.

Pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelian tersebut atau disebut juga dengan pendapatan yang dibelanjakan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan (*saving*). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup>Suharyadi, Purwanto S.K. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat: 2003), hlm.11.

Selain konsumsi, fenomena ekonomi lain yang sering menjadi pembahasan dalam masalah-masalah ekonomi di berbagai negara adalah inflasi. Inflasi (*inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dengan kata lain, terjadinya inflasi berarti hargabarang dan jasa mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa ini telah menyebabkan daya beli riil menjadi turun. Penurunan daya beli masyarakat ini akan berdampak terhadap penurunan konsumsi mereka atas barang dan jasa. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan inflasi berarti telah terjadi penurunan harga barang dan jasa. Penurunan hargabarang dan jasa ini telah menyebabkan daya beli riil masyarakat menjadi meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat ini akan berdampak terhadap kenaikan konsumsi mereka atas barang dan jasa.

Dalam pendekatan moneter, inflasi dinilai sebagai suatu fenomena moneter, yaitu keadaan yang disebabkan terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan kesediaan masyarakat untuk memiliki atau menyimpan uang tersebut. Pendapat tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa peningkatan hargabarang di pasar terjadi karena kelebihan permintaan dibandingkan dengan penawaran terhadap barang tersebut (*excess demand for goods*) yang merupakan indikasi adanya kelebihan jumlah uang yang beredar dimasyarakat atau adanya kelebihan penawaran uang dibandingkan dengan permintaan terhadap uang (*excess supply for money*). Artinya, terdapat akses permintaan dalam sektor barang dan jasa pada sektor riil karena masyarakat menilai bahwa jumlah uang yang beredar terlalu banyak apabila dibandingkan

dengan kesediaan mereka untuk memiliki atau menyimpan uang tersebut, maka setiap kali mereka menerima uang mereka akan segera membelanjakannya.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hyperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu, selain daripada itu, inflasi juga dapat melemahkan tingkat konsumsi masyarakat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah /miskin.

Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama Dolar Amerika), akibat adanya *domino effect* dari terdepresiasinya mata uang Thailand (bath), salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Lonjakan harga barang-barang ini, menyebabkan harga hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat baik secara langsung maupun secara

tidak langsung, terutama barang yang memiliki kandungan barang impor yang tinggi.

Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek, kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi permintaan agregat.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan Kota padangsidempuan, Medan, Pematangsiantar dan sibolga Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2004-2013**

TAHUN	Kemiskinan Perkota (%)			
	Padangsidempuan	Medan	Pematangsiantar	Sibolga
2004	13,65	7,13	11,56	9,01
2005	11,35	7,06	10,96	11,00
2006	12,22	7,77	12,07	10,09
2007	10,92	7,17	9,46	9,73
2008	11,61	10,43	13,36	17,67
2009	9,77	9,58	12,25	15,82
2010	10,53	10,05	11,72	13,91
2011	10,08	9,63	11,15	13,18
2012	9,40	9,33	10,79	13,00
2013	9,04	9,64	10,93	12,90

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara ( di olah)

**Tabel 1.2**  
**Konsumsi Pemerintah Kota Padangsidempuan, Medan, Pematangsiantar dan**  
**Sibolga Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2004-2013**

TAHUN	Konsumsi Pemerintah (%)			
	Padangsidempuan	Medan	Pematangsiantar	Sibolga
2004	25,78	27,64	26,03	25,52
2005	25,89	27,76	26,11	25,78
2006	26,24	27,91	26,47	26,08
2007	26,54	28,21	26,68	26,25
2008	26,67	28,26	26,88	26,53
2009	26,59	28,50	26,93	26,51
2010	26,60	28,50	26,91	26,48
2011	26,79	28,72	27,14	26,75
2012	26,94	28,99	27,23	26,73
2013	27,26	29,15	27,41	26,99

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (di olah)*

Konsumsi pemerintah dengan kemiskinan berdasarkan teori memiliki hubungan positif, konsumsi pemerintah sejalan dengan tingkat kemiskinan, yang dimana apabila tingkat peneluaran pemerintah tinggi yaitu pemerintah akan banyak mengeluarkan dana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang dimana salah satunya adalah kemiskinan, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan pada tahun-tahun tertentu mengalami fenomena yang tidak sesuai dengan toeri, dimana dari data di atas menyatakan bahwasanya pengeluaran pemerintahtidak selalu berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 4 Kota Sumatera Utara, dimana dengan angka pengeluaran pemerintah yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya tidak meminimkan tingkat kemiskinan di beberapa tahun tertentu.

Pengaruh pengeluaran pemerintah tidak selalu berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Di karenakan beberapa faktor yang membuat hubungan antara kedua variabel ini tidak sesuai dengan teori. Salah satu faktor yang sangat menentukannya yaitu dengan minimnya tingkat pendidikan individu masyarakat, seseorang individu masyarakat akan kurang menikmati dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tingkat pendidikan yang rendah di karenakan dengan tingkat pendidikan yang rendah dia tidak dapat memanfaatkan dan mengalokasikan dana yang ada secara maksimal dengan rendahnya pengetahuan. Telah kita ketahui bahwa alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan, yaitu dengan alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah maka seseorang akan mendapatkan tambahan pendapatan.

Dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dapat diambil contoh bahwa konsumsi pemerintah tidak selalu berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dimana pada tahun-tahun tertentu terjadi fenomena yang tidak sejalan dimana walaupun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu kemiskinan tetapi tingkat kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara di tahun-tahun tertentu tidak sejalan dengan teori yaitu dengan konsumsi pemerintah yang tinggi tetapi kemiskinan tetap tergolong tinggi di beberapa kota tertentu di provinsi Sumatera Utara, contohnya di kota Sibolga dimana tingkat kemiskinan tahun 2008 sebesar (17,67%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2007 hanya (9,73%) mengalami penambahan

angka kemiskinan sebesar **(7,94%)** melalui data di atas kita dapat melihat bahwasanya tingkat kemiskinan dari tahun 2007 sampai dengan 2008 mengalami tingkat kemiskinan yang paling tinggi jika di bandingkan dengan tahun-tahun yang lain, dengan konsumsi pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui sejauh mana konsumsi pemerintah mempengaruhi kemiskinan maka tulisan ini diberi judul **“Pengaruh Konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara periode 2004-2013**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Selama periode tahun 2004-2013 tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara terus mengalami fluktuasi.
2. Tingkat konsumsi pemerintah di provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Walaupun konsumsi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tingkat kemiskinan tetap tinggi di beberapa tahun-tahun tertentu.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah konsumsi pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2004-2013.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan 4 Kota di Sumatera Utara. Adapun keempat kota yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Padangsidimpuan
2. Medan
3. Pematang Siantar
4. Sibolga

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 4 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### **F. Definisi Operasional Variabel**

Variabel merupakan gejala yang menjadi *focus* penelitian untuk diamati. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel *dependen* dan konsumsi pemerintah sebagai variabel *independen*. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Skala Variabel</b>
Konsumsi (X)	Konsumsi pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat	1. Konsumsi rutin/ pengeluaran rutin 2. Konsumsi pembangunan/ pengeluaran pembangunan 3. Tujuan Konsumsi	Rasio
Tingkat Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standart hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, papan.	1. kurangnya pangan, sandang dan papan (perumahan) yang layak 2. terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif 3. kurangnya jaminan dan kesejahteraan	Rasio

### **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh Konsumsi Pemerintah terhadap kemiskinan.
2. Sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan sosial ekonomi yang sedang dihadapi.
3. Sebagai bahan perbandingan kepada pihak peneliti lain untuk mengembangkan teori tentang pokok masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Konsumsi**

###### **a. Pengertian Konsumsi**

Menurut bahasa, Konsumsi adalah pemakaian sehari-hari. Dalam istilah ekonomi, konsumsi adalah digunakannya jasa-jasa atau benda-benda materil untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Jadi perilaku ekonomi adalah suatu sikap atau perilaku manusia dalam menggunakan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan intensif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri, mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi intensif untuk meningkatkannya.<sup>1</sup> Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer, dan hanya bila para ahli ekonomi mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi saja, mereka dapat dianggap kompeten untuk

---

<sup>1</sup>Masyhuri Machfudz, Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, (Malang: UIN-Maliki Press: 2002), hlm. 87.

mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

Pengeluaran konsumsi atau yang disebut “*Consumtion*” adalah salah satu variabel makro ekonomi yang merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga ke atas barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau disebut juga dengan pendapatan yang dibelanjakan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan, dilambangkan dengan huruf “S” inisial dari kata *saving*. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, hasilnya adalah pengeluaran konsumsi pemerintah negara yang bersangkutan.

Menurut Sudarsono konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang berlangsung dan berakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup>

Adapun menurut Ilmu Ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga kelangsungan hidup. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah (*goverment consumption*) dan konsumsi rumah tangga masyarakat (*houaehold comsumtion/ private comsumtion*).

---

<sup>2</sup>Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Jasa Pirusa, 1991), hlm. 100.

Dalam Ilmu Ekonomi, konsumsi diartikan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial dari produksi.<sup>3</sup> Atau dengan kata lain, produksi merupakan alat bagi konsumsi. Melalui kenyataan-kenyataan itu, dapat diambil semacam kesimpulan bahwa produksi itu diperlukan selama masih diperlukan pula konsumsi. Kalau saja (misalnya, sekalipun sama sekali tidak realistis) konsumsi berhenti sama sekali, dalam arti bahwa masyarakat tidak memerlukan konsumsi lagi, produksi pun tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, logika ini tidak dapat berlaku sebaliknya, yakni tidak dapat dikatakan bahwa apabila produksi berhenti, konsumsi pun harus berhenti pula.

Pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, dimana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan ( $y$ ) maka konsumsinya ( $c$ ) juga makin tinggi.

#### **b. Konsumsi Pemerintah**

Menurut Mangkeusubroto pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli suatu barang dan jasa, konsumsi pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 163.

<sup>4</sup>Guritno, Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik Edisi 3* (Yogyakarta: BPEE, 2008), hlm. 169.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Pengeluaran Pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- 2) Pengeluaran Pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- 3) Pengeluaran Pemerintah untuk *transper payment*, *transper payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Secara ekonomis *transper payment* mempunyai status dan pengaruh

---

<sup>5</sup>Harry A.P. Sitaniapessy, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD, jurnal* (Ambon: Politeknik Negeri Ambon), hlm .40.

<sup>6</sup>BasukiPujoalwanto, *Pereokomian Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.178-179.

yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor, yang penting diantaranya adalah:<sup>7</sup>

1) Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah ialah jumlah pajak yang diramalkan.

2) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Ada beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.

3) Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara golongan masyarakat dan daerah menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

---

<sup>7</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 168-169.

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk belanja perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Konsumsi pembangunan/pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasikan. Dana ini kemudian

---

<sup>8</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (yogyakarta: kanisius, 1992), hlm. 377-379.

di alokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih di tekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif demi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.<sup>9</sup>

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

- a) Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam pengalokasian sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *equilibrium*.

---

<sup>9</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 158-161.

- d) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam meggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Konsumsi/pengeluaran pemerintah sudah diatur dalam Al-Qur`an terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

مُؤْمِنِينَ

*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.*

*Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya.<sup>10</sup>*

Adapun penjelsan dari ayat di atas adalah bahwasanya harta yang di miliki pemerintah terdapat sebagian harta orang lain. Oleh sebab itu, seharusnya dana yang ada tersebut di alokasikan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan syari`at islam dan ketentuan yang berlaku agar mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Surabaya: Sukses publishing, 2012), hlm. 178.

### c. Ciri-Ciri Barang Konsumsi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, barang konsumsi adalah barang yang diperlukan untuk pemenuhan kehidupan agar mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Untuk mengkategorisasikan barang kebutuhan yang termasuk kedalam barang konsumsi, ciri-ciri tersebut antara lain adalah:<sup>11</sup>

- 1) Benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya menghirup udara, berjemur pada sinar matahari pagi, dan mandi sungai bukanlah termasuk kegiatan konsumsi karena kegiatan tersebut bisa didapat secara gratis.
- 2) Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan gergaji, cangkul, mesin-mesin, dan barang-barang modal lainnya yang bertujuan menambah faedah benda, tidak dikategorikan tidak di kategorikan kedalam kegiatan konsumsi. Namun kegiatan tersebut termasuk kedalam kegiatan produksi.
- 3) Manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang di gunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur.

---

<sup>11</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.107.

#### **d. Tujuan Konsumsi**

Seseorang melakukan kegiatan konsumsi biasanya memiliki beberapa tujuan berikut:<sup>12</sup>

- 1) Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap.

Hal-hal yang termasuk kedalam klasifikasi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap adalah misalnya penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu singkat, seperti mobil, motor, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga seperti meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Untuk mengurangi nilai guna suatu barang tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap.

- 2) Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus.

Hal yang termasuk ke dalam klasifikasi menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang yang habis pakai atau tidak barang yang tidak bertahan lama, seperti makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka bahan-bahan tersebut akan rusak, basi, dan kadaluwarsa sehingga tidak memiliki nilai guna lagi.

- 3) Memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani

Hal yang termasuk kedalam konsumsi ini adalah seperti perjalanan haji dan umroh bagi ummat muslim ke tanah suci arab. Hal seperti ini akan menimbulkan kepuasan batin dan rohani bagi seseorang yang telah melakukannya. Tentu saja untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 109-110.

hal tersebut diperlukan biaya perjalanan, biaya pendaftaran, dan biaya lain sebagainya. Namun jika seseorang telah memiliki niat kuat, maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu masalah yang besar.

#### **e. Pola Konsumsi**

Pola konsumsi merupakan suatu susunan akan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dan tergantung berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa pola konsumsi seseorang berbeda dengan orang lainnya. Hal ini tergantung dari besarnya pendapatan seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya berdasarkan prioritas yang pokok dan sekunder. Seperti kebutuhan pokok adalah kebutuhan untuk makan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan yang termasuk kedalam kebutuhan sekunder adalah liburan dan rekreasi. Sehingga ketika pendapatan seseorang tersebut mengalami penurunan, maka orang tersebut akan memangkas kebutuhan sekundernya kemudian memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok terlebih dahulu.

Hal ini akan menekan kebiasaan melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Karena pada dasarnya perilaku konsumtif akan menimbulkan efek negatif dan tidak baik bagi tingkat perekonomian

seseorang. Maka dari itu, seseorang harus menerapkan pola konsumsi yang rasional dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>13</sup>

Besar kecilnya konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Perkiraan harga di masa mendatang
- 3) Harga barang yang bersangkutan
- 4) Barang substitusi dan parlementer
- 5) Iklan
- 6) Ketersediaan barang dan jasa
- 7) Selera
- 8) Mode
- 9) Jumlah
- 10) Lingkungagn sosial budaya

#### **f. Konsumsi dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam, anugerah Allah itu milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugrah-anugrah itu berada di tangan orang-orang tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan anugrah itu untuknya, sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>14</sup>M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm.113.

Analisis selanjutnya tentang perintah Islam mengenai konsumsi yang dikendalikan oleh prinsip keadilan dan kebersihan:

1) Prinsip keadilan

Dalam Islam bahwasanya prinsip keadilan sangat di tekankan untuk terhindar dari yang namanya ketidakpastian (Gharar).

2) Prinsip kebersihan

Dalam islam kebersihan sangat di utamakan tidak hanya dalam hal pakaian, lingkungan tetapi juga mencakup aspek konsumsi yang bersih maksudnya dalam melakukan konsumsi, manusia di tuntut untuk berlaku bersih dalam mengonsumsi makanan ataupun non makanan.

Konsumsi yang berlebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, yang dalam Islam disebut dengan istilah *israf*(pemborosan) atau *tabzar* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Padahal dalam Islam, keadaan seperti itu tidaklah diizinkan atau dilarang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

Aturan pertama terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an dalam Q.s Al-Baqarah 168ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

*syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>15</sup>

Ayat di atas mengandung arti ganda, mengenai mencari rezki secara halal dan tidak dilarang oleh hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang dalam Islam adalah: darah, daging babi, daging binatang yang telah mati sendiri, daging binatang yang disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai qurban untuk memuja berhala atau Tuhan-Tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah.

Kebijakan syari'ah dalam konsumsi untuk memanfaatkan pendapatan adalah dalam kondisi yang berimbang (*balance*).<sup>16</sup> Keseimbangan antara belanja konsumtif dan produktif (investasi), keseimbangan antara belanja pribadi dan kepentingan masyarakat, keseimbangan antara aspek duniawi dan aspek ukhrowi.

Ada tiga hal yang mempengaruhi belanja konsumtif

- 1) Tingkat pendapatan (*income*), konsumsi orang kaya berbeda dengan konsumsi orang miskin.
- 2) Tingkat kebutuhan (*need*), konsumsi mahasiswa berbeda dengan siswa SMU.
- 3) Lingkungan masyarakat, konsumsi usia, musim, domisili juga berbeda.

---

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Surabaya: Sukses publishing, 2012), hlm. 26.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 87.

Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga kerohanian.<sup>17</sup> Rasionalisme dalam islam tidak hanya didasarkan pada dorongan akal, tetapi juga pada nilai-nilai keilahan yang akan memudahkan seseorang untuk mencari dan mendapatkan kebenaran tentang konsumsi yang harus dilakukan.

#### g. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Misalnya, porsi pengeluaran rumahtangga di Indonesia pada tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) mencapai sekitar 60% pengeluaran agregat. Bahkan, pada awal tahun 1970-an dari pengeluaran agregat. Sedangkan pengeluaran pemerintah umumnya berkisar antara 10% sampai 20% pengeluaran agregat. Mengingat porsinya yang besar tersebut, maka konsumsi rumahtangga mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap stabilitas perekonomian.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا 

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (al-israa` : 27).*<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Azhari Akmal Tarigan, Isnaini Harahap, Muhammad Yafiz, M. Ridwan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung:Cita Pustaka Media: 2006), hlm. 279.

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Surabaya: Sukses publishing: 2002),hlm. 284.

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

#### **h. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Berbeda dengan konsumsi pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa dalam arti, besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhinya. Karena itu kita dapat menyusun teori dan model ekonomi yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan tingkat konsumsi dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Teori dan model tersebut dikenal sebagai teori dan model konsumsi (*consumption theory/ models*). Teori dan model konsumsi telah terbukti bermanfaat bagi pengelolaan perekonomian makro.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, dimana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan (Y) maka konsumsinya (C) makin tinggi juga.

$$C=f(Y)$$

---

<sup>19</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia:2002), hlm.257.

### i. Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan

Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga (secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi). Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar (skedul) konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah.<sup>20</sup> Misalnya, seperti dapat dilihat dalam tabel, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp 500 ribu, konsumsinya adalah Rp 500 ribu. Pada waktu pendapatannya Rp 900 ribu, konsumsinya adalah Rp 800 ribu. Secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan.

**Tabel 2.1**  
**Pendapatan, Konsumsi dan Tabungan**  
(dalam ribu rupiah)

No	Pendapatan disposibel (Y)	Pengeluaran Konsumsi (C)	Tabungan (S)
1	0	125	-125
2	100	200	-100
3	200	275	-75
4	300	350	-50
5	400	425	-25
6	500	500	0
7	600	575	25
8	700	600	50
9	800	725	75
10	900	800	100
11	1000	875	125

---

<sup>20</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 108

Contoh angka yang dibuat pada tabel di atas, adalah contoh yang memberikan gambaran mengenai ciri-ciri khas dari hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposibel. Ciri-ciri yang digambarkan dalam tabel 3 di atas adalah:

- 1) Dimana pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan.
- 2) Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi.
- 3) Pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung.

#### **j. Faktor yang Dominan Mempengaruhi Konsumsi**

- 1) Pendapatan (*Income*)

Pendapatan (*income*) adalah jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa. Secara teori, apabila pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. Dan apabila pendapatan menurun, maka konsumsi akan menurun.

- 2) Harga (*Price*)

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk.<sup>21</sup>

Kemudian, pendapatan *disposibel* berpengaruh positif terhadap konsumsi di Indonesia. Adanya pengaruh positif ini antara pendapatan *disposibel* dan konsumsi mengartikan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan *disposibel*. Kondisi ini

---

<sup>21</sup>Matthew Bishop, *Op. Cit.*, hlm. 152.

disebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan *disposibel* akan menyebabkan terjadinya kenaikan daya beli. Daya beli yang semakin tinggi akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi. Sebaliknya, penurunan pendapatan *disposibel* akan mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi sebab daya beli akan semakin berkurang.

Keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup, misalnya makanan dan perumahan. Karena pendapatan meningkat, pengeluaran atas banyak barang makanan akan naik. Orang makan lebih banyak dan lebih baik. Akan tetapi, ada batasan terhadap uang ekstra yang akan dibelanjakan pada makanan ketika pendapatan mereka naik. Akibatnya, proporsi total pengeluaran yang diberikan untuk makanan menurun saat pendapatan meningkat.

## **2. Kemiskinan**

### **a. Pengertian kemiskinan**

kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan

kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.<sup>22</sup>

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2010) penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendaptan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD per orang per

---

<sup>22</sup>Eni Rochaida, Gamal Abdul Aziz, Warsilan, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, jurnal* (Jakarta: Universitas Mulawarman Indonesia), hlm, 32.

hari. Ukuran Kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi.

#### Teori lingkaran kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul Karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yaitu suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian

rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

## **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan**

### **1) Pendidikan**

Hampir tidak ada yang yang membantah bahwa pendidikan adalah adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran suatu bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau bahkan mengalami kebodohan yang sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan.

### **2) Pengangguran**

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah

seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

### **3) Pengeluaran Pemerintah**

dalam mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam:

#### **a) Pengeluaran rutin**

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda

pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi ( subsidi dibagi menjadi dua: subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara.

b) Pengeluaran pembangunan

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik, pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Menurut kuncoro, garis kemiskinan adalah semua ukuran kemiskinan yang dipertimbangkan berdasarkan norma-norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua elemen yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Mudjarat Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 243

Indonesia di landa krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang memaksa Indonesia mencari tambahan pinjaman luar negeri secara substansial. Semakin meningkatnya jumlah hutang tersebut mengakibatkan hutang rakyat kecil dan jumlah kelompok miskin ikut bertambah meskipun mereka belum turut menikmati manisnya kue pembangunan.<sup>24</sup>

Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Sekitar abad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda pun telah meresahkan kemiskinan akut di pulau jawa. Pada saat itu, kemiskinan hanya dilihat sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang pesat dan tidak dikaitkan dengan kebijakan pola tanam paksa. Bahkan kemiskinan semakin menjalar dengan diberlakukannya politik liberal yang menyebabkan masuknya barang industri murah ke daerah pedesaan. Setelah lebih dari 50 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah. Periode awal 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah mencapai prestasi yang mengagumkan dalam pengurangan kemiskinan. Sekitar pertengahan 1990-an kurang dari 15% dari populasi dikategorikan sebagai miskin absolut. Namun demikian, kenyataan obyektif yang masih tergambar menunjukkan lebih dari 70% rakyat hidup di pedesaan. Sekitar 50% dari total angkatan kerja nasional menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian.

---

<sup>24</sup>Abdul Bashit, *Ekonomi Kemsyarakatan, Visi & Statégi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 1-2.

Statistik menunjukkan 80% dari rakyat hanya mengenyam pendidikan formal tertinggi setingkat sekolah dasar (SD)

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan mrbatat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.Pemberdayaan ekonomi masyarakat membuthkan partisipasi aktif dan kreatif.<sup>25</sup>

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.Dalam arti luas kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank*, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tiada memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm, 27.

<sup>26</sup>Arius junaidi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia.Jurnal Kajian Ekonomi*.Vol.1, no. 1, April 2012, hlm, 140-164.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan diukur melalui dua komponen, yaitu: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

### c. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, kemiskinan tidak dianggap sebagai kehinaan. Islam memperhatikan nasib kaum fakir miskin dengan menyatakan dalam harta orang kaya terdapat hak kaum fakir miskin.<sup>27</sup>


 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S Adz-Dzariyyat: 19).*<sup>28</sup>

Ayat di atas tidak dimaknai sebagai membenaran terhadap Orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta dan tidak menerima saja, ayat tersebut dijadikan sebagai pengingat dan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama muslim.

### d. Paradigma penanggulangan kemiskinan

penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu sebabnya adalah adanya kekeliruan dalam strategi dan kelemahan dalam pelaksanaan

---

<sup>27</sup>Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm, 222.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), hlm, 521.

pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dibarengi dengan pemerataan. Pilihan pinjaman luar negeri untuk sumber pembiayaan dengan paket pola pembangunan dari donor yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak pro kaum miskin
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab
3. Tumbuh suburnya budaya materialistis
4. Lemahnya ilmu pengetahuan
5. Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme KKN yang sistematis dan kronis dari aparat
6. Politik pertahanan yang tidak adil
7. Perencanaan pembanguana yang bersifat *top down*
8. Pelaksanaan program yang berorientasi keproyekan
9. Liberalisasi perekonomian yang terlalu dini tanpa persiapan yang memadai dan kebijakan pendukung yang kurang memperhatikan kelompok miskin yang telah meminggirkan rakyat kecil.

Untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat multidimensi, maka diperlukan perubahan paradigma dengan meredefinisi peran pemerintah. Strategi besar perekonomian juga akan lebih pro kaum miskin dan pro keadilan dengan pendekatan *people driven* yang mengembangkan pola

*bottom-up* dalam perencanaan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan.<sup>29</sup>

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas sebagaimana dicantumkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004 yang berbentuk undang-undang. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang mempunyai tugas utama mengembangkan diskursus setara untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga legislatif dan eksekutif serta masyarakat lainnya untuk menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang menempatkan si miskin menjadi aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.

Fungsi yang akan dijalankan BKPK antara lain:

1. Mediasi

Yaitu: penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah maksudnya proses penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar tidak berpihak terhadap salah satu pihak yang bermasalah guna mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan.

---

<sup>29</sup>Opcit, hlm, 73-74.

## 2. Katalisasi

Yaitu: suatu proses untuk menanggulangi kemiskinan dengan melakukan berbagai penyadaran terhadap masyarakat untuk memperoleh dana.

## 3. Advokasi

Yaitu: suatu upaya atau suatu proses untuk mendapatkan komitmen yang dalam hal ini di lakukan dengan cara persuasif yang menggunakan keakuratan dan ketepatan suatu informasi.

## 4. Fasilitasi

Yaitu: proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu atau melayani dan memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

## 5. Koordinasi

Yaitu: kegiatan yang dilakukan berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pihak lainnya.

Sedangkan tujuan BKPK adalah mendorong pemerintah dan masyarakat agar menerapkan paradigma baru dalam penanggulan kemiskinan yang menempatkan si miskin menjadi aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.

Pada tahun 1950-1960-an ditandai oleh pasang naik industrialisasi substansi impor. Negara-negara berkembang biasanya memulai dengan memproteksi industri barang jadi (*final stage of industry*), seperti pembuatan makanan dan perakitan mobil. Di negara-negara berkembang yang lebih besar, produk-produk domestik hampir sepenuhnya menggeser barang-barang konsumsi yang diimpor (meskipun manufaktur kerap di laksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional). Jika kemungkinan-kemungkinan pengalihan impor barang-barang konsumsi telah jenuh, negara-negara ini beralih kepada perlindungan barang-barang antara, seperti rangka mobil, baja, dan petrokimia.<sup>30</sup>

Di kebanyakan perekonomian yang sedang berkembang, gerak laju substitusi impor berhenti segera telah mencapai suatu batas logisnya: barang-barang manufaktur canggih seperti komputer, perlengkapan mesindan sebagainya tetap diimpor. Namun demikian, negara-negara yang lebih besar yang menempuh industrialisasi substitusi impor mengurangi impornya ke tingkatan yang amat rendah. Biasanya, negara-negara yang ukuran ekonomi yang lebih kecil (yang diukur, misalnya dengan nilai output total) pangsa impor dan eksportnya dalam pendapatan nasional lebih besar.

Sebagian besar pendapatan dunia dihasilkan oleh segelintir negara maju: negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara, serta Jepang,

---

<sup>30</sup>Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm, 303-304.

Australia, dan Selandia Baru. Mereka adalah negara-negara yang beruntung, yang kemakmurannya menimbulkan kecemburuan negara-negara lain. Sekalipun demikian negara-negara ini tetap menginginkan untuk terus meningkatkan kekayaan melalui pertumbuhan ekonomi.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Rahmah Amalia, Madris, Abd.rahman Razak (Unuversitas hasanuddin)	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi sulawesi selatan (jurnal)	Dimana Variabel Independennya yaitu kemiskinan.  Variabel Dependennya pengeluaran pemerintah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten, secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tetapi secara tidak lansung, tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di sulawesi barat. Tetapi kalau di pusat berpengaruh nrgatif dan tidak signifikan.
2.	Adi widodo, Waridin, Johanna maria. Universitas diponegoro Semarang 2007-2009	Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan an kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan IPM di provinsi jateng	Dimana variabel independennya yaitu kemiskinan.  Variabel dependennya yaitu peneluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan.	Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataua kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan.

<sup>31</sup>Ibid, hlm, 329.

		(jurnal)		
3.	Fitrah Afrizal (universitas hasanuddin) makassar 2001-2011	Analisis pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan tahun (skripsi)	Variabel independenya investasi, pengeluaran pemerintah  Variabel dependennya PDRB	hasil penelitian ini bahwasanya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan
4.	Gamal Abdul Azis, Eny Rochaida, Warsilan	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara (Jurnal)	Variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan.  Di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah.	1. laju pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pendapatan perkapita masyarakat meningkat akan mengurangi angka kemiskinan, tetapi dari penelitian ini perhitungan yang diperoleh tidak signifikan sehingga bisa dianggap variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara. 2. pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan,

				artinya bahwa jika pendidikan masyarakat meningkat akan mengurangi angka kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pengangguran meningkat akan terjadi kenaikan angka kemiskinan. Kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara.
5.	Ellen Rusliati dan Syarah Nurul Fathoni 2006-2009	Inflasi, suku bunga deposito dan <i>return</i> pasar terhadap <i>return</i> saham pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (Jurnal).	Variabel independennya yaitu konsumsi.  Variabel dependennya yaitu inflasi.	Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan pers

amaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan proposal skripsi yang peneliti buat melalui hipotesis/penelitian sementara peneliti.

Dimana persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

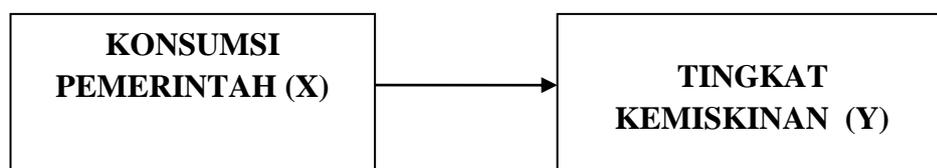
1. Persamaannya yaitu di ambil dari penelitian terdahulu yang pertama

2. dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten, secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. hasil penelitian ini bahwasanya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan
4. Perbedaannya yaitu di ambil dari penelitian terdahulu yang ke dua Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak seacara langsung mempengaruhi IPM ataa kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang baik berisi kerangka pikir yang disusun berdasarkan identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah kerangka yang menggambarkan Pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan di 4 kota di provinsi sumatera utara. Untuk lebih jelasnya berikut gambar kerangka pikir dalam penelitian ini.

**Skema 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Dari skema di atas, dapat dipahami bahwa konsumsi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemiskinan, dimana konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjelankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>32</sup> Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam:

#### 1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kdan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi ( subsidi dibedakan menjadi dua: subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga hutang negara.

#### 2. Pengeluaran Pembangunan

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai

---

<sup>32</sup>Op.Cit, Hlm.37

perogram-perogram pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Pengaruhnya adalah dengan adanya pengeluaran pemerintah akan meminimalisir angka kemiskinan, dan konsumsi pemerintah akan membuat masyarakat lebih terbantu dengan adanya dana dari pemerintah utamanya bagi golongan menengah ke bawah, di karenakan dengan adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan akan meringankan bagi rakyat miskin yang akan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu dengan jalur prestasi, di bidang kesehatan akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan yang diinginkan contohnya dengan adanya kartu BPJS kesehatan.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 76.

Berdasarkan pengertian hipotesis di atas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Untuk lebih jelasnya uraian hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ha= Ada pengaruh konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara periode 2004-2013.

Ho= Tidak ada pengaruh konsumsi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara periode 2004-2013.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Peneliti memilih BPS sebagai sebagai tempat penelitian dikarenakan disinilah peneliti lebih mudah menemukan data yang menjadi pokok permasalahannya. Penelitian ini akan dilakukan mulai Februari sampai dengan April 2017.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya, data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.<sup>1</sup>Data yang diteliti adalah gabungan data *time series* dengan *datacross section* yaitu data panel yang di himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dari tahun 2004-2013.

#### **C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>2</sup> Instrument merupakan alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data. Instrumen yang baik dalam penelitian sangat penting, sebab instrument yang

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 13.

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka cipta, 2010), hlm.101.

baik dapat menjamin pengambilan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder, jenis data kuantitatif merupakan data angka atau numerik yaitu data panel yaitu data konsumsi pemerintah dan kemiskinan yang di himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Instrumen pengumpulan data berupa data yang di ambil dari BPS Sumatera Utara melalui Internet dengan website [www. BPS Sumatera Utara. Com](http://www.BPS.SumateraUtara.Com).

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengolah atau menginterpretasikan data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Teknik analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, terutama apabila penelitian tersebut bermaksud untuk mengambil kesimpulan dari masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan untuk mengubah atau menganalisis data dari hasil penelitian agar dapat di interpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik eviuws 9.

---

<sup>3</sup>Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) , hlm. 150.

Tekhnik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Uji Estimasi

Dalam model regresi menggunakandatapanel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model estimasi yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect Model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kedua, *Fixed Effect Model* dengan menambah variabel *dummy* pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS.

Ketiga model diuji satu per satu. Dalam penelitian ini, data menggunakan model data logaritma natural (Ln). Penggunaan logaritma natural dalam penelitian ini karena data yang digunakan memiliki satuan yang berbeda. Pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan program EViews 9.

#### a. Model *Commont Effect*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *crosssection* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, untuk model *commont effect*.

### b. Model *Fixed Effect*

Model regresi dengan model *fixed effect* tetap mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya.

### c. Model *Random Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode *random effect* adalah dengan menambah variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar Kabupaten/Kota.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji t test

Uji *t-test* digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara sendiri (parsial) terhadap variabel dependent. Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

#### 1) Perumusan Hipotesis

$H_{01}$ : Konsumsi pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

$H_{a1}$ : Konsumsi pemerintah terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

2) Menentukan  $t_{hitung}$  berdasarkan hasil pengujian regresi data panel *random effect* diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.630771.

3) Menentukan nilai  $t_{tabel}$  dengan ketentuan nilai  $\alpha / 2 = 0,05/2 = 0,025$  dan derajat kebebasan (df) = (n-2),  $df = 40 - 2 = 38$ . Sehingga nilai  $t_{tabel}$  adalah sebesar 2,02269 (lihat pada lampiran tabel).

#### 4) Kriteria Pengujian Hipotesis

- a) Jika  $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}}$  atau  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika  $-t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak.

#### b. Uji F test

Uji f digunakan untuk mengetahui secara simultan apakah konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji signifikansi parameter regresi secara simultan digunakan uji statistik F. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan berdasarkan nilai  $F_{\text{hitung}}$ .

##### 1) Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Konsumsi pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

$H_a$  : Konsumsi pemerintah terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

- 2) Menentukan  $F_{\text{hitung}}$  berdasarkan hasil pengujian regresi data panel *random effect* diketahui bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}$  adalah sebesar 7.951296.
- 3) Menentukan nilai  $F_{\text{tabel}}$  dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan  $df = 1$  dengan  $df 1 = n - k - 1$  atau  $40 - 1 - 1 = 38$ , hasil diperoleh untuk  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,24.

##### 4) Kriteria Pengujian Hipotesis

- a) Jika  $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

#### **1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara**

Di zaman pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera*, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sumatera Utara tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai seorang gubernur dan terdiri dari daerah-daerah administrative keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen.<sup>1</sup>

Dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera mengingat kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, kemudian diputuskan dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan keresidenan Tapanuli.

Dalam perkembangan selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, pemerintah menetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga Provinsi

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015* (<http://www.bps.go.id/pdf>) diakses 10 Januari 2017, 20:30 WIB.

yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, berkaitan dengan meningkatnya serangan Belanda dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di Sumatera dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.M, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Agustus 1949 No.8/Des/W.K.P.M tahun 1949, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara, dengan daerah yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) pasal 1 No. 24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi Provinsi Aceh.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No.22 tentang Otonomi Daerah, maka pengaturan rumahtangga daerah telah berada pada kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal ini

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 untuk membentuk Dinas-Dinas sebagai institusi teknis didalam melaksanakan tugasdan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terletak pada  $1^{\circ} - 4^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}$ - $100^{\circ}$  Bujur Timur, Luas dataran Provinsi Sumatera Utara 72,981 dan 23 Km<sup>2</sup>. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah didalam Provinsi yang *Sumatra's Oostkust* paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini termasuk *Residentie Sumatra's Oostkust* bersama Provinsi Riau.

Di wilayah tengah Provinsi berjajar pegunungan bukit barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah disekitar Danau Toba dan pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit,

dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat batak, minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan bahasa minangkabau. Untuk mengetahui 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada table.

**Tabel 4.1**  
**Kabupaten/Kota dan Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
2	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
5	Kabupaten Tapanuli Utara	Balige
6	Kabupaten Toba Samosir	tarutung
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat
8	Kabupaten Asahan	Kisaran
9	Kabupaten Simalungun	Raya
10	Kabupaten Dairi	Sidikalang
11	Kabupaten Karo	Kabanjahe
12	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
13	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
15	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
16	Kabupaten Samosir	Pangururan
17	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
18	Kabupaten Batubara	Limapuluh
19	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
20	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
21	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
22	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
23	Kabupaten Nias Utara	Lotu
24	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
25	Kabupaten Langkat	Stabat
26	Kota Sibolga	-
27	Kota Tanjungbalai	-
28	Kota Pematangsiantar	-
29	Kota Tebing Tinggi	-
30	Kota Medan	-
31	Kota Binjai	-
32	Kota Padangsidempuan	-
33	Kota Gunungsitoli	-

Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk kedalam Provinsi Sumatera saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 Kabupaten, 8 Kota (dahulu kotamadya), 325 Kecamatan, dan 5.456 Kelurahan/Desa.

## **2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara**

### **a. Visi**

Menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

### **b. Misi**

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*).

## **B. Hasil Model Estimasi Data Panel**

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model estimasi yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect Model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kedua, *Fixed Effect Model* dengan menambah variabel *dummy* pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS.

Ketiga model diuji satu per satu. Dalam penelitian ini, data menggunakan model data logaritma natural (Ln). Penggunaan logaritma natural dalam penelitian ini karena data yang digunakan memiliki satuan yang berbeda. Pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan program EViews 9.

### **1. Model *Common Effect***

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *crosssection* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, untuk model *common effect* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel4.2**  
**Model Regresi Commont Effect**

Dependent Variable: INFLASI  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/31/17 Time: 21:45  
Sample: 2004 2013  
Included observations: 10  
Cross-sections included: 4  
Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.808588	-1.701196	0.0973
C	130.8243	83.09247	1.574442	0.1239
KEMISKINAN	0.371645	0.906457	0.409998	0.6842
R-squared	0.300601	Mean dependent var		8.100000
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var		4.607094
S.E. of regression	3.955677	Akaike info criterion		5.660219
Sum squared resid	578.9532	Schwarz criterion		5.786885
Log likelihood	-110.2044	Hannan-Quinn criter.		5.706018
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat		2.912253
Prob(F-statistic)	0.001341			

Sumber: Data penelitian (di olah)

## 2. Model Fixed Effect

Model regresi dengan model *fixed effect* tetap mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interseptya.

Untuk model *fixed effect* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel4.3**  
**Hasil Estimasi Fixedeffect**

Dependent Variable: INFLASI  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/31/17 Time: 21:46  
Sample: 2004 2013  
Included observations: 10  
Cross-sections included: 4  
Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1122
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1405
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6968
Fixed Effects (Cross)				
_SIBOLGA—C	-2.01E-14			
_SIANTAR—C	-2.01E-14			

_MEDAN—C	-2.01E-14		
_PSP—C	-2.01E-14		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Adjusted R-squared	0.197749	S.D. dependent var	4.607094
S.E. of regression	4.126504	Akaike info criterion	5.810219
Sum squared resid	578.9532	Schwarz criterion	6.063551
Log likelihood	-110.2044	Hannan-Quinn criter.	5.901816
F-statistic	2.922639	Durbin-Watson stat	2.912253
Prob(F-statistic)	0.026700		

Sumber: Data Penelitian, (di olah)

### 3. Model *Random Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode *random effect* adalah dengan menambah variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar Kabupaten/Kota. Untuk model *random effect* dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji *Random Effect***

Dependent Variable: INFLASI  
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 05/31/17 Time: 21:47  
Sample: 2004 2013  
Included observations: 10  
Cross-sections included: 4  
Total pool (balanced) observations: 40  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966
Random Effects (Cross)				
_SIBOLGA—C	0.000000			
_SIANTAR—C	0.000000			
_MEDAN—C	0.000000			
_PSP—C	0.000000			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000

Idiosyncratic random		4.126504	1.0000
Weighted Statistics			
R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var	4.607094
S.E. of regression	3.955677	Sum squared resid	578.9532
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat	2.912253
Prob(F-statistic)	0.001341		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Sum squared resid	578.9532	Durbin-Watson stat	2.912253

*Sumber: Data Penelitian, (di olah)*

### C. Hasil Uji Hipotesis

#### 1. Uji t test

Uji *t-test* digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara sendiri (parsial) terhadap variabel dependent. Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk hasil pengujian uji t pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji t-test**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966

Pengujian yang dilakukan peneliti berdasarkan nilai  $t_{hitung}$ . Hasil pengujian variabel-variabel penelitian secara parsial adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan

1) Perumusan Hipotesis

$H_0$ : Konsumsi pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

$H_1$ : Konsumsi pemerintah terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

2) Menentukan  $t_{hitung}$  berdasarkan hasil pengujian regresi data panel *random effect* diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.630771.

3) Menentukan nilai  $t_{tabel}$  dengan ketentuan nilai  $\alpha / 2 = 0,05/2 = 0,025$  dan derajat kebebasan ( $df = (n-2)$ ,  $df = 40 - 2 = 38$ ). Sehingga nilai  $t_{tabel}$  adalah sebesar 2,02269 (lihat pada lampiran tabel).

4) Kriteria Pengujian Hipotesis

a) Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung}$  atau  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

b) Jika  $-t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

5) Kesimpulan

Dari hasil pengujian data panel dapat menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1.630771 < 2,02269) maka  $H_0$  diterima yang artinya konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

**2. Uji F test**

Uji f digunakan untuk mengetahui secara simultan apakah konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji signifikansi parameter regresi secara simultan digunakan uji statistik F. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan berdasarkan nilai  $F_{hitung}$ .

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji F test**

R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var	4.607094
S.E. of regression	3.955677	Sum squared resid	578.9532
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat	2.912253
Prob(F-statistic)	0.001341		

*Sumber: Data penelitian (di olah)*

Dari tabel di atas peneliti akan melakukan pengujian variabel secara simultan melalui langkah-langkah berikut:

a. Perumusan Hipotesis

Ho: Konsumsi pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

Ha: Konsumsi pemerintah terdapat pengaruh terhadap kemiskinan.

b. Menentukan  $F_{hitung}$  berdasarkan hasil pengujian regresi data panel

*random effect* diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 7.951296.

c. Menentukan nilai  $F_{tabel}$  dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikan

0,05 dengan  $df = 1$  dengan  $df 1 = n - k - 1$  atau  $40 - 1 - 1 = 38$ , hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 3,24.

d. Kriteria Pengujian Hipotesis

1) Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

e. Kesimpulan:

Dari hasil pengujian data panel menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (7.951296. > 3,24.) maka  $H_0$  ditolak yang artinya konsumsi pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi. Untuk melihat nilai  $R^2$  dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var	4.607094
S.E. of regression	3.955677	Sum squared resid	578.9532
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat	2.912253
Prob(F-statistic)	0.001341		

Berdasarkan hasil tabel diatas maka nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.300601 menunjukkan bahwa variabel independen (konsumsi pemerintah) berpengaruh sebesar 30 persen terhadap variabel dependen (kemiskinan) sedangkan sisanya sebesar 70 persen dipengaruhi atau

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang berjudul “pengaruh konsumsi pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Utara periode 2004-2013” dapat di ambil kesimpulan, antara lain:

1. Melalui analisis yang dilakukan dengan memakai uji t-test di dapatkan hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}(7.951296. > 3,24.)$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya konsumsi pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.
2. Konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan melalui uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) di peroleh pengaruh sebesar 30% sedangkan sisanya sebesar 70% persen dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji di lakukan bahwasanya konsumsi pemerintah tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan di atas, berikut akan diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini.

Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Tingkat konsumsi pemerintah dan kemiskinan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu dapat untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Utara perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah masih kurang efisien. Oleh karena itu bagi lembaga pemerintahan diharapkan untuk lebih mengevaluasi apa yang menyebabkan kemiskinan.
3. Bagi lembaga pemerintah langkah baiknya mengadakan sosialisasi dan survei ke daerah-daerah terpencil untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashit, *Ekonomi Kemsyarakatan, Visi & Stategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Arius junaidi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1, no. 1, April 2012.
- Azhari Akmal Tarigan, Isnaini Harahap, Muhammad Yafiz, M. Ridwan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara dalam Angka 2015 (<http://www.bps.go.id.pdf>), Diakses 10 Januari 2017, 20:30 WIB.
- Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Sukses Publishing, 2012.
- Guritno, Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik Edisi 3*, Yogyakarta: BPEE, 2008.
- <http://statistik.com>, Diakses pada Hari Selasa, 31 Januari 2017 Pukul. 15:10 WIB.
- <http://sejarahBPS.com>, diakses pada hari Kamis, 8 Desember 2016 Pukul 23:15 WIB.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Masyhuri Machfudz, Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, Malang: UIN-Maliki Press, 2002.
- Mudjarat Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, jakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Rahardja Prathama, & MandalaManurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2002.

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

\_\_\_\_\_, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

\_\_\_\_\_, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011

Sitaniapessy, Harry A.P, *Penagruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD*, Jurnal, Ambon: Politeknik Negeri Ambon.

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Jasa Pirusa, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993.

[www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id), Diakses pada Hari Kamis, 9 Maret 2017, Pukul: 09:15 WIB.

**CURUCULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**DATA PRIBADI**

Nama : Zulfikri Nasution  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Simpanggambir, 17 Juni 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Simpanggambir, Lingga Bayu, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara  
Telepon/No. HP : 0858-6249-5420  
E-mail : [zulfikripasid16@gmail.com](mailto:zulfikripasid16@gmail.com)

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2000-2006 : SD Negeri 1 Simpanggambir  
Tahun 2006-2009 : MTs. N Simpanggambir  
Tahun 2009-2012 : SMK Negeri 1 Batang Natal  
Tahun 2012-2017 : Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (22080) Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 23 /In. 14/G.6a/PP.009/09/2017 Padangsidimpuan, 9 September 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Kesediaan  
Menjadi Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :

1. Dr. Darwis Harahap S. Hi., M. Si
2. Azwar Hamid, M.A

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Zulfikri Nasution  
NIM : 12 230 0128  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Konsumsi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2004-2013

Untuk itu diharapkan kepada Bapak agar bersedia membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Mengetahui:

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Muhammad Isa, ST., MM  
NIP. 19800605201101 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, S.Hi., M. Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~

Pembimbing II

Azwar Hamid, M.A  
NIP. 19860311 201502 1 005

**Tabel4.2**  
**Model Regresi Commont Effect**

Dependent Variable: INFLASI  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/31/17 Time: 21:45  
 pSample: 2004 2013  
 Included observations: 10  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.808588	-1.701196	0.0973
C	130.8243	83.09247	1.574442	0.1239
KEMISKINAN	0.371645	0.906457	0.409998	0.6842
R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000	
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var	4.607094	
S.E. of regression	3.955677	Akaike info criterion	5.660219	
Sum squared resid	578.9532	Schwarz criterion	5.786885	
Log likelihood	-110.2044	Hannan-Quinn criter.	5.706018	
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat	2.912253	
Prob(F-statistic)	0.001341			

Sumber: Data penelitian (di olah)

**Tabel4.3**  
**Hasil Estimasi Fixedeffect**

Dependent Variable: INFLASI  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/31/17 Time: 21:46  
 Sample: 2004 2013  
 Included observations: 10  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1122
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1405
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6968
Fixed Effects (Cross)				
_SIBOLGA—C	-2.01E-14			
_SIANTAR—C	-2.01E-14			

**Tabel 4.3**  
**Hasil Estimasi Fixedeffect**

Dependent Variable: INFLASI  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/31/17 Time: 21:46  
 Sample: 2004 2013  
 Included observations: 10  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1122
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1405
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6968
Fixed Effects				
(Cross)				
_SIBOLGA—C	-2.01E-14			
_SIANTAR—C	-2.01E-14			

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji RandomEffect**

Dependent Variable: INFLASI  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/31/17 Time: 21:47  
 Sample: 2004 2013  
 Included observations: 10  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 40  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966
Random Effects				
(Cross)				
_SIBOLGA—C	0.000000			
_SIANTAR—C	0.000000			
_MEDAN—C	0.000000			
_PSP—C	0.000000			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000

Idiosyncratic random 4.126504 1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Adjusted R-squared	0.262796	S.D. dependent var	4.607094
S.E. of regression	3.955677	Sum squared resid	578.9532
F-statistic	7.951296	Durbin-Watson stat	2.912253
Prob(F-statistic)	0.001341		

Unweighted Statistics

R-squared	0.300601	Mean dependent var	8.100000
Sum squared resid	578.9532	Durbin-Watson stat	2.912253

Sumber: Data Penelitian, (di olah)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji t-test**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji t-test**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji t-test**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMERINTAH	-4.777959	2.929877	-1.630771	0.1114
C	130.8243	86.68083	1.509265	0.1397
KEMISKINAN	0.371645	0.945603	0.393025	0.6966